

# LAMPIRAN

### Lampiran 1 Biodata Peneliti:



Nama : Dina Ardila

Jenis Kelamin : Perempuan

TTL : LongKali, 28 September 1999

Agama : Islam

Kewarganegaraan : WNI

Alamat : Jl Rantau Belimbing Rt 11/00 Kec. LongKali Kab. Paser

Jurusan : Hubungan Internasional

NIM : 1811102434021

E-mail : [ardilad333@gmail.com](mailto:ardilad333@gmail.com)

Riwayat Pendidikan : SDN 010 Longkali (2007-2012)  
SMPN 1 Longkali (2012-2015)  
SMAN 1 Longkali (2015-2018)  
Universitas Muhammadiyah KalTim (2018-2022)

Organisasi : Kader IMM Samarinda (Periode 2018)  
Sekretaris IMM Bidang Sosial (Periode 2020)

## Lamiran 2 Surat Keterangan Pernyataan Literature Review:

### LEMBAR PERNYATAAN LITERATURE REVIEW

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dina Ardila  
NIM : 1811102434021  
Program Studi : SI Hubungan Internasional  
Judul Penelitian : Kebijakan Ekonomi-Politik Amerika Serikat  
Dalam Mendorng Ekonomi Digital

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa dalam laporan peneliti ini menggunakan *literature review* (kajian pustaka) dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk penelitian lain atau untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada perguruan tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya orang lain atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Peneliti,



Dina Ardila

# Measuring the digital economy in the United States

Erich H. Strassner and Jessica R. Nicholson\*

*National Economic Accounts, Bureau of Economic Analysis, Washington, DC, USA*

**Abstract.** The United States' Bureau of Economic Analysis (BEA) has recently published statistics exploring the size and growth of the digital economy in response to the interests of the data user community and the international statistical community. BEA independently developed preliminary digital economy statistics but has relied on consultation with other statistical organizations and participation in numerous international working groups aimed at advancing coordinated and internationally comparable digital economy measurement. This report describes BEA's digital economy measurement efforts to date including initial work towards a digital economy satellite account and related research on quantifying the value of "free" digital media the treatment and measurement of data. This report also discusses BEA's efforts to improve price measures for high-tech goods and services, notably internet and wireless services, cloud services, and ride-hailing services. Lastly, the report provides an overview of BEA's measurement work related to digital services international trade.

**Keywords:** Digital economy measurement, free digital media, high-tech prices, data measurement, internet and wireless services, cloud services, ride-hailing services, international trade in digital services

## 1. Introduction

Over the past several years, there has been increased interest in measuring the digital economy. While there is no widely adopted official definition of what the digital economy encompasses, there is broad agreement that

size and growth of the digital economy in response to the interests of the data user community and the international statistical community. BEA independently developed preliminary digital economy statistics but has relied on consultation with other statistical organizations and participation in numerous international

# A U.S. Grand Strategy for the Global Digital Economy

ROBERT D. ATKINSON | JANUARY 2021

---

For America to remain the global leader in IT, the U.S. government must formulate a grand strategy grounded in a new doctrine of “digital realpolitik.” The first priority should be advancing U.S. interests by spreading the U.S. digital innovation policy system and constraining digital adversaries, especially China. This will entail working with allies when possible—and pressuring them when necessary.

---

- U.S. IT and digital policy needs to be guided by a grand, overall strategy, focused first and foremost on maintaining U.S. global tech leadership.
- The United States faces a risk where much of the world, including the EU, could align against U.S. IT and digital interests, leading to a many-against-one environment, with detrimental consequences.
- In efforts to reestablish closer relations with the EU, the United States should not “give away the store” by allowing the EU to go forward with its increasingly aggressive technology mercantilism.

## Abstract

Advances in digital technology are expanding the boundaries of firms. Digital platform firms, which leverage a “platform” to create value through facilitating exchanges between two or more interdependent groups, are the new disrupters in the market. They exhibit distinct features such as scale without mass, positive network effects, accumulation of tremendous data, and a convoluted value creation process with user participation. Meanwhile, they bring more opportunities to traditional businesses by closely connecting suppliers and customers and reducing transaction frictions. Such a changing business landscape calls for adaptive policies and regulations. This policy paper lays out the key policy and regulatory issues around digital businesses. Competition

laws need to be revisited to address the winner-take-all tendency of digital platform businesses. Tax systems should also be updated to close the loopholes available to digital platform businesses so that they pay their fair share to society. This paper also provides the first analysis of the World Bank’s Digital Business Indicators initiative, which collects information on the existence and quality of regulations in broadband connectivity, digital payment, data privacy and security, as well as logistics, in 21 pilot countries. It aims to explore the possibilities for developing the regulatory and policy indicators that governments can work with to promote the digital economy.

---

This paper is a product of the Global Indicators Group, Development Economics. It is part of a larger effort by the World Bank to provide open access to its research and make a contribution to development policy discussions around the world. Policy Research Working Papers are also posted on the Web at <http://www.worldbank.org/prwp>. The author may be contacted at [rchen5@worldbank.org](mailto:rchen5@worldbank.org).

### ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan alasan di balik kebijakan restriktif yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat kepada perusahaan multinasional asal Tiongkok, Huawei. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang memutuskan untuk melarang operasi bisnis Huawei dengan memasukkan nama perusahaan tersebut kedalam *entity list* dari BIS. Penelitian ini memosisikan pemerintah Amerika Serikat sebagai aktor utama, dan berusaha untuk menjawab seluruh alasan di balik pelarangan operasi bisnis yang berlaku. Jawaban tersebut dikerangkakan melalui konsep keamanan nasional, spionase ekonomi, kepentingan negara *home*, intervensi terhadap operasi bisnis, dan rivalitas teknologi. Proses analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang berusaha untuk mengilustrasikan suatu pola melalui interpretasi terhadap sumber dan data yang dikumpulkan. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat dua alasan utama bagi pemerintah Amerika Serikat untuk memberlakukan kebijakan restriktif kepada perusahaan Huawei di Amerika Serikat. Pertama, Huawei dianggap mengancam keamanan nasional Amerika Serikat akibat operasi siber seperti spionase yang dilakukan secara rahasia. Kedua, terdapat keterlibatan pemerintah Tiongkok yang signifikan terhadap operasi bisnis Huawei, dan hal tersebut berkaitan erat dengan rivalitas teknologi yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Melalui temuan tersebut, terdapat sebuah pemahaman mengenai alasan politik di balik pelarangan operasi bisnis sebuah perusahaan multinasional swasta.

**Kata-kata Kunci:** Huawei, Intervensi Pemerintah, Spionase Ekonomi, Rivalitas Teknologi, Pelarangan Operasi Bisnis.





## Perjanjian Perdagangan AS-Jepang “Tahap Satu”

Pada 7 Oktober 2019, setelah enam bulan negosiasi formal, Amerika Serikat dan Jepang menandatangani dua perjanjian yang dimaksudkan untuk meliberalisasi perdagangan bilateral. Pertama, Perjanjian Perdagangan AS-Jepang (USJTA), memberikan pengurangan tarif terbatas dan perluasan kuota untuk meningkatkan akses pasar. Yang lainnya, Perjanjian Perdagangan Digital AS-Jepang, mencakup komitmen yang berkaitan dengan aspek digital dari perdagangan internasional, seperti aliran data lintas batas. Perjanjian ini merupakan apa yang dibayangkan oleh Pemerintahan Trump dan Abe sebagai “tahap satu” dari negosiasi liberalisasi perdagangan yang lebih luas, yang pertama kali diumumkan oleh kedua pemimpin pada September 2018. Kedua pihak telah menyatakan niat mereka untuk melanjutkan negosiasi pada kesepakatan yang lebih komprehensif setelah perjanjian ini berlaku. Kongres memiliki kepentingan dalam negosiasi perjanjian perdagangan AS-Jepang yang diberikan otoritas kongres untuk mengatur perdagangan luar negeri dan dampak potensial perjanjian tersebut terhadap ekonomi dan konstituen AS.

USJTA adalah untuk mengurangi atau menghilangkan tarif pada pertanian dan beberapa barang industri, yang mencakup sekitar \$ 14,4 miliar (\$ 7,2 miliar masing-masing impor dan ekspor AS) atau 5% dari perdagangan bilateral. Amerika Serikat akan mengurangi atau menghilangkan tarif pada sejumlah kecil

(241) dari sebagian besar barang industri, sementara Jepang akan mengurangi atau menghilangkan tarif pada sekitar 600 jalur tarif pertanian dan memperluas kuota tarif preferensial untuk sejumlah produk AS yang terbatas. Amerika Serikat meringkaskan komitmen perdagangan digital sebagai “standar emas”, dengan komitmen pada perlakuan nondiskriminatif terhadap produk digital, dan larangan hambatan pelokalan data dan pembatasan aliran data lintas batas, di antara ketentuan lainnya. Perjanjian tahap satu mengecualikan sebagian besar barang lain dari liberalisasi tarif dan tidak mencakup akses pasar untuk layanan, aturan di luar perdagangan digital, atau hambatan nontarif.

Khususnya, perjanjian tersebut tidak mencakup perdagangan mobil, sebuah industri yang menyumbang sepertiga dari impor AS dari Jepang. Keputusan Jepang untuk berpartisipasi dalam pembicaraan bilateral muncul setelah Presiden Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif mobil tambahan di Jepang, berdasarkan masalah keamanan nasional.

Sebelum Pemerintahan Trump, Amerika Serikat menegosiasikan perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang menghapus hampir semua tarif antara para pihak dan mencakup berbagai aturan dan disiplin terkait perdagangan dalam satu negosiasi komprehensif, yang sebagian besar didorong oleh negosiasi AS yang dijamin oleh kongres. tujuan.

Masalah nontarif sering kali mengharuskan penerapan undang-undang oleh Kongres untuk diterapkan, dan Kongres biasanya

R46140

20 Desember 2019

**Brock R. Williams,**  
Koordinator

Spesialis di Internasional  
Perdagangan dan Keuangan

**Cathleen D. Cimino-Isaacs**

Analisis di Internasional  
Perdagangan dan Keuangan

**Anita Regmi**

Analisis di Pertanian  
Aturan



# New and Revised Statistics of the U.S. Digital Economy, 2005–2020

by Tina Highfill and Christopher Surfield

This report provides an overview of [updated and revised digital economy statistics for 2005–2020](#) as released by the U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA). These statistics build on the [2005–2019 estimates released in June 2021](#) by incorporating new data for 2020 and revised source data for 2005–2019. The new data show in 2020, the U.S. digital economy accounted for \$3.31 trillion of gross output, \$2.14 trillion of value added (translating to 10.2 percent of U.S. gross domestic product (GDP)), \$1.09 trillion of compensation, and 7.8 million jobs.<sup>1</sup> Growth in price-adjusted GDP (also referred to as “chained-dollar” or “real” GDP) was 4.0 percent in 2020, greatly outpacing growth in the overall economy, which contracted –3.4 percent.<sup>2</sup> Hardware, software, and business-to-consumer (B2C) e-commerce were the main drivers of growth in the digital economy for 2020. These new digital economy statistics suggest this area of the economy was mostly insulated from the declines seen in other areas of the economy caused by the pandemic. See [BEA’s digital economy website](#) for the detailed data tables, plus other research and papers related to this subject.

The new 2020 data and growth in recent years (2012–2020) are the focus of this report. A brief overview of the methodology is also provided, along with a description of the revisions to the 2005–2019 estimates, and a short discussion of the results and plans for future work.

# Understanding the Challenges of the Digital Economy: The Nature of Digital Goods

Thierry RAYNA  
Imperial College London

**Abstract:** This article investigates the economic nature and characteristics of digital goods. Such goods are, due to their replicability, shown to be public goods (albeit in an evolutionary way) and durable goods. Furthermore, the content of such goods, combined with their durability, makes them experience goods. While only one of these characteristics would be sufficient to create difficulties for producers and lead to market failure, this article demonstrates that each of the characteristics reinforces the other. The framework presented in the article is then applied to two important issues: the new trend of massive consumer piracy and the overall problem of value of digital goods.

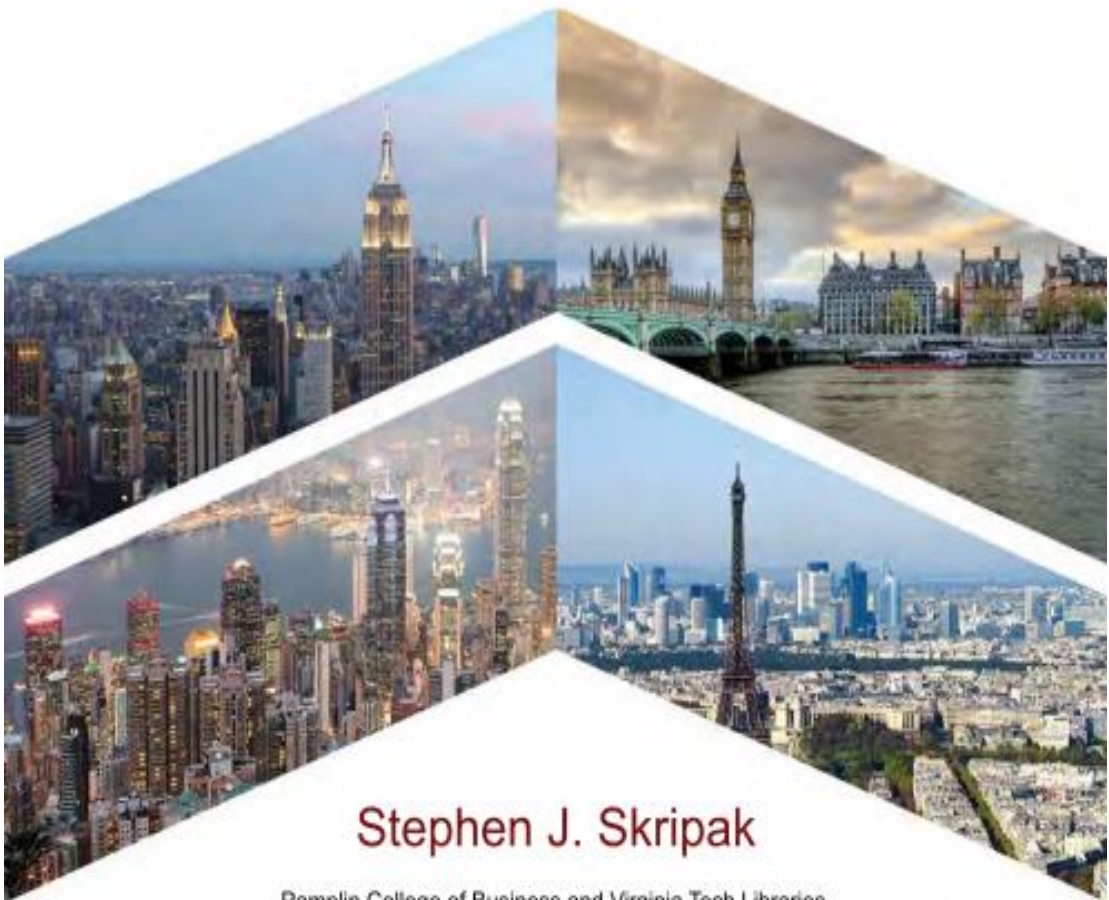
**Key words:** digital goods, public goods, durable goods, experience goods, piracy.

The last decade has seen the advent and growth of two strongly linked phenomena which have led to important changes in the worldwide economy. The first is the development of the digital economy, based on the digitalisation of previously existing goods and on the development of new purely digital goods. This technology has not only permitted the creation of many new goods or services, but has also dramatically changed the way an entire category of goods in the economy are created, produced, distributed, exchanged and consumed. Digital technology has caused a drastic decrease in reproduction costs and distribution costs (and even, sometimes, in initial production costs), thereby leading to important structural changes in the economy and potentially a global rise of social welfare, due to the increase in quantity, quality and variety of goods and services available in the economy. While originally restricted to a few types of good (software,

---

# FUNDAMENTALS OF BUSINESS

Second Edition



**Stephen J. Skripak**

Pamplin College of Business and Virginia Tech Libraries

**VT Publishing**  
Blacksburg, Virginia





## STRATEGI KEAMANAN *CYBER* AMERIKA SERIKAT

Dewi Triwahyuni<sup>1)</sup>,  
Tine Agustin Wulandari<sup>2)</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Komputer Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Komputer Indonesia

email: dewi.triwahyuni@email.unikom.ac.id

email: Tine.wulandari@email.unikom.ac.id

### ***Abstract***

*The development of information technology has provided a significant shift from the concept of security. At present, countries are not limited to interact physically in real space but also extends to cyberspace. Consequently, the state must adapt to this development. nowadays the concept of cyber security should be established as one of the "territory" of the state which should be safeguarded as the state's obligation to secure its borders. Now the interaction between the actors of international relations is not only in the land, sea and air alone. The interaction between the actors also performed in the virtual space into other options to achieve the interests. This study aimed to test the importance of cyber security strategies in the foreign policy of the United States. Where the United States in the last 10 years is very intense spawned a cyber security strategy. This study uses qualitative research methods to get in-depth answers to the problems studied. The results showed that the United States has put cyber security as a top priority in its foreign policy. It is clearly mentioned in official documents and US security strategy. The United States realizes that it needs a comprehensive strategy to safeguard its national interests in the global world.*

*Keywords: Strategy, Cyber Security, United States*

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan perubahan yang signifikan dari konsep keamanan. Saat ini, negara-negara tidak terbatas untuk berinteraksi secara fisik dalam ruang nyata tetapi juga meluas ke dunia maya. Akibatnya, negara harus beradaptasi dengan perkembangan ini. saat ini konsep keamanan cyber harus ditetapkan

## **UPAYA MENINGKATKAN PEMAHAMAN MASYARAKAT RPTRA KELURAHAN BINTARO AKAN MANFAAT DAN BAHAYA TEKNOLOGI DIGITAL MELALUI PENYULUHAN SEHAT BERBASIS PENDIDIKAN**

**Safitri Jaya<sup>1\*</sup>, Prio Handoko<sup>2</sup>, Wayan Suparta<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Informatika, Fakultas Teknologi dan Desain, Universitas Pembangunan Jaya,  
Jalan Cendrawasih Raya Blok B7/P, Sawah Baru, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15413

\*safitri.jaya@upj.ac.id











### **ABSTRAK**

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu bentuk teknologi yang berkembang sangat pesat saat ini. Melalui salah satu fitur andalannya yaitu internet, seolah memberi gambaran bahwa kedudukan TIK selalu berada pada peringkat teratas, baik dari sisi positif (manfaat) maupun sisi negatif (dampak) dari penggunaannya. Dibalik kelebihan tentu ada kekurangan, ada yang disadari dan ada juga yang mungkin tidak disadari oleh pengguna bahwa penggunaan teknologi yang salah dapat memberikan dampak yang buruk. Hal ini disebabkan karena kehadiran teknologi sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ragam aktivitas sehari-hari. Laju pertumbuhan teknologi belum diimbangi dengan kualitas manusia sebagai pengguna. Masih banyak pengguna yang belum bijak dalam memanfaatkan kehadiran teknologi. Kegiatan pengabdian masyarakat kali ini merupakan lanjutan dari kegiatan pengabdian masyarakat sebelumnya. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat RPTRA akan manfaat, dampak dan cara menggunakan teknologi yang tepat guna. Metode penyuluhan disampaikan melalui ceramah dan juga pelatihan TIK (pelatihan menggunakan internet yang bijak dalam pembelajaran). Metode ini dipilih sebagai upaya agar dapat meningkatkan pemahaman masyarakat RPTRA khususnya akan manfaat dari teknologi digital. Disamping memahami manfaat, narasumber/instruktur juga akan menyisipkan pesan akan dampak yang ditimbulkan apabila pengguna tidak bijak dalam memanfaatkan teknologi digital dalam beraktivitas. Pada tahap awal, metode penyuluhan yang telah diberikan kepada masyarakat RPTRA (Guru dan Siswa/I Kelas 5 SDN 02 Bintaro) adalah ceramah dan permainan tebak aplikasi *online* yang selalu digunakan dalam berbagai aktivitas masyarakat. Hasil penyuluhan pada tahap ini, yang diikuti oleh 56 orang peserta (2 orang pengelola + 2 orang guru pendamping + 52 orang siswa/i SDN 02

Lampiran 4 Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi:

**Daftar Kegiatan Pembimbingan Skripsi  
Program Studi Hubungan Internasional FEB – UMKT**

**Nama** : Dina Ardila  
**NIM** : 1811102434021  
**Judul Penelitian** : Kebijakan Ekonomi-Politik Amerika Serikat Dalam Mendorong Ekonomi Digital  
**Pembimbing Pertama** : Intan Kinanthi Damarin Tyas, S.IP., M.A

No	Kegiatan	Paraf
1	14 April 2022, Bimbingan Pertama setelah seminggu, Revisi di Argumen Pokok dan Masukan data-data ke latar belakang	
2	20 Mei 2022, membahas sub judul di bab 2 dan Isi-Isinya di bab 2	
3	27 Mei 2022, membahas isi dari bab 2 tentang Kebijakan, kondisi ekonomi, Bukti-Bukti Perdagangan	
4	10 Juni 2022, membahas ekonomi digital di bab 2 dan membahas tantangan Digital Amerika Serikat	
5	17 Juni 2022, membahas tantangan Digital AS dan tambahkan studi kasusnya	
6	20 Juni 2022, Bimbingan online yang dikirim file lewat email berisi Bab 3 dan bab 4	
7	21 Juni 2022, Bimbingan online membahas studi kasus di Cyber security, SDN, Persaingan Digital	
8	24 Juni 2022, membahas Kebijakan AS dalam ekonomi Digital, Apa saja upaya Pemerintah	
9	26 Juni 2022, membahas Proteksionisme AS dalam ekonomi Digital, Kebijakan Cyber security, Kerjasama Digital	
10	27 Juni 2022, membahas Kerjasama digital AS, dan upaya Pemerintah AS dalam Dunia Pendidikan	
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		



**Lampiran 5 Turnitin :**

# Skripsi 1 : Kebijakan Ekonomi- Politik Amerika Serikat Dalam Mendorong Ekonomi Digital

*by* Dina Ardila

---

**Submission date:** 12-Aug-2022 09:54AM (UTC+0800)

**Submission ID:** 1881559874

**File name:** file\_skripsi\_Dina\_Ardila.docx (71.73K)

**Word count:** 13290

**Character count:** 90513

# Skripsi 1 : Kebijakan Ekonomi-Politik Amerika Serikat Dalam Mendorong Ekonomi Digital

## ORIGINALITY REPORT



## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://nanopdf.com">nanopdf.com</a> Internet Source	1%
2	<a href="https://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a> Internet Source	1%
3	<a href="https://www.djkn.kemenkeu.go.id">www.djkn.kemenkeu.go.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="https://inspirasi.bpsdm.jabarprov.go.id">inspirasi.bpsdm.jabarprov.go.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="https://journal.uta45jakarta.ac.id">journal.uta45jakarta.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="https://www.fortuneidn.com">www.fortuneidn.com</a> Internet Source	1%